

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Globalisasi ekonomi ditandai dengan banyaknya aliran modal atau investasi asing yang masuk serta mulai diberlakukannya integrasi ekonomi (Zaroni, 2015), dimana lambat laun mulai mengikis batas-batas kegiatan ekonomi secara regional, namun membuatnya semakin mengglobal. Integrasi ekonomi yang muncul menimbulkan kejadian baru dimana negara-negara kini perlahan mulai menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan (Abidin, 2019), baik lokal maupun internasional sehingga mampu mendorong pelaku ekonomi dalam meningkatkan investasi. Dengan meningkatnya investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dilihat dari sumbernya, investasi bisa berasal dari dalam negeri (Domestik) maupun luar negeri (Asing). Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, investasi dalam negeri merupakan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan investasi asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing. *Foreign Direct Investment* (FDI) sendiri diyakini menjadi salah satu pembiayaan penting bagi negara-negara berkembang tak terkecuali Indonesia. FDI menyediakan modal yang sangat dibutuhkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam negeri melalui transfer teknologi dan pengetahuan teknis bagi tuan rumah (Owusu-antwi et al., 2013). FDI memiliki manfaat untuk meningkatkan pendapatan nasional negara melalui perpajakan,

Perbedaan iklim investasi tiap negara membuat tidak semua negara dapat mencapai titik investasi yang mereka inginkan. Menurut Lembong (2019), terdapat lima kendala investasi di Indonesia, yaitu banyaknya peraturan yang menghambat

datangnya penanaman modal, rezim perpajakan yang tidak memberikan ruang lebih kepada pengusaha, kualitas SDM yang relatif masih rendah, masalah pertanahan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang terakhir adalah masalah infrastruktur sebagai pendukung utama dari industri. Berdasarkan lima hal tersebut, permasalahan ini menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti.

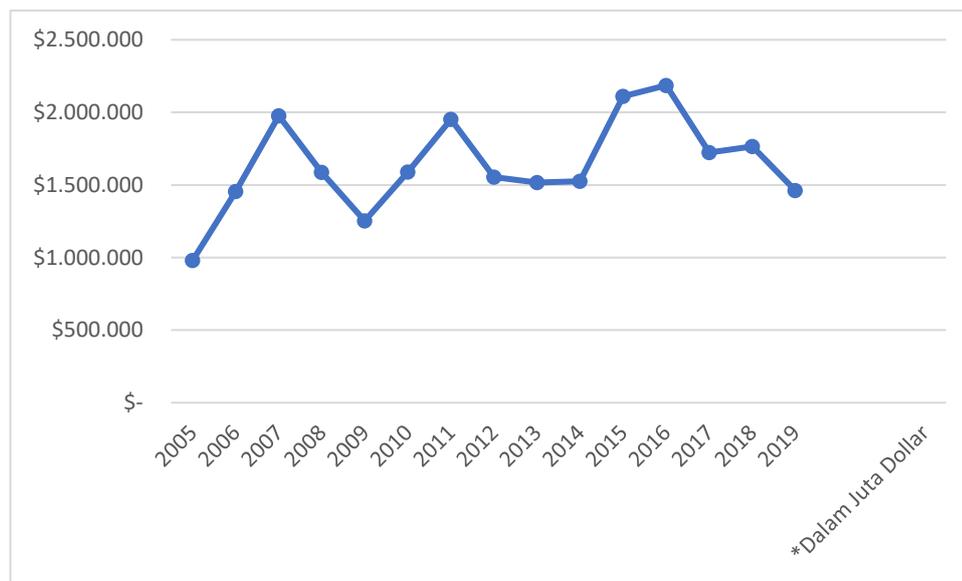
Selama beberapa tahun terakhir, perkembangan investasi di Indonesia sendiri terus meningkat sejalan dengan adanya regulasi baru mengenai investasi asing. Menurut Indriani, (2020) bahwa total investasi langsung Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp 105,0 triliun (naik 17,8%) dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018. Indonesia membutuhkan investasi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomiannya, dimana peran investasi asing sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang masih tertinggal. Selain itu juga, investasi asing dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk menyaring pekerja-pekerja lokal.

Tingginya investasi asing di suatu negara dipengaruhi oleh adanya *risk* dan *benefit* yang ditawarkan oleh negara tuan rumah. Dari sisi risiko, jumlah investasi yang tinggi dapat semakin meningkat karena dipengaruhi oleh risiko yang mungkin masih bisa diatasi oleh calon investor. Salah satu risiko yang akan dihadapi yaitu kurang kondusifnya iklim investasi yang disebabkan ketidakmampuan negara tuan rumah dalam mengatur sumber dayanya secara optimal (Hardiwinoto, 2013). Keberadaan negara dalam mengatur sumber daya dan melakukan pembiayaan, dilakukan oleh audit independen setiap negara. Pengelolaan negara ini tentunya akan menjadi salah satu indikator bahwa negara tersebut memiliki iklim investasi yang kondusif atau sebaliknya.

Investasi asing memiliki dampak positif dari kemajuan teknologi di wilayah tuan rumah (Hu et al., 2021). Transfer teknologi yang terjadi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dari perusahaan-perusahaan domestik sekaligus menciptakan lapangan kerja yang baru sehingga mampu mengarah kepada pertumbuhan ekonomi. Investasi asing juga memiliki dampak signifikan terhadap geografi ekonomi internal suatu negara (Ramachandran et al., 2020). Perusahaan-

perusahaan domestik menunjukkan adanya konsentrasi wilayah yang berada di dekat perusahaan asing untuk mendapatkan keuntungan dari limpahan investasi asing

**Gambar 1. 1**  
**Penerimaan Investasi Asing Langsung**



Sumber: OECD

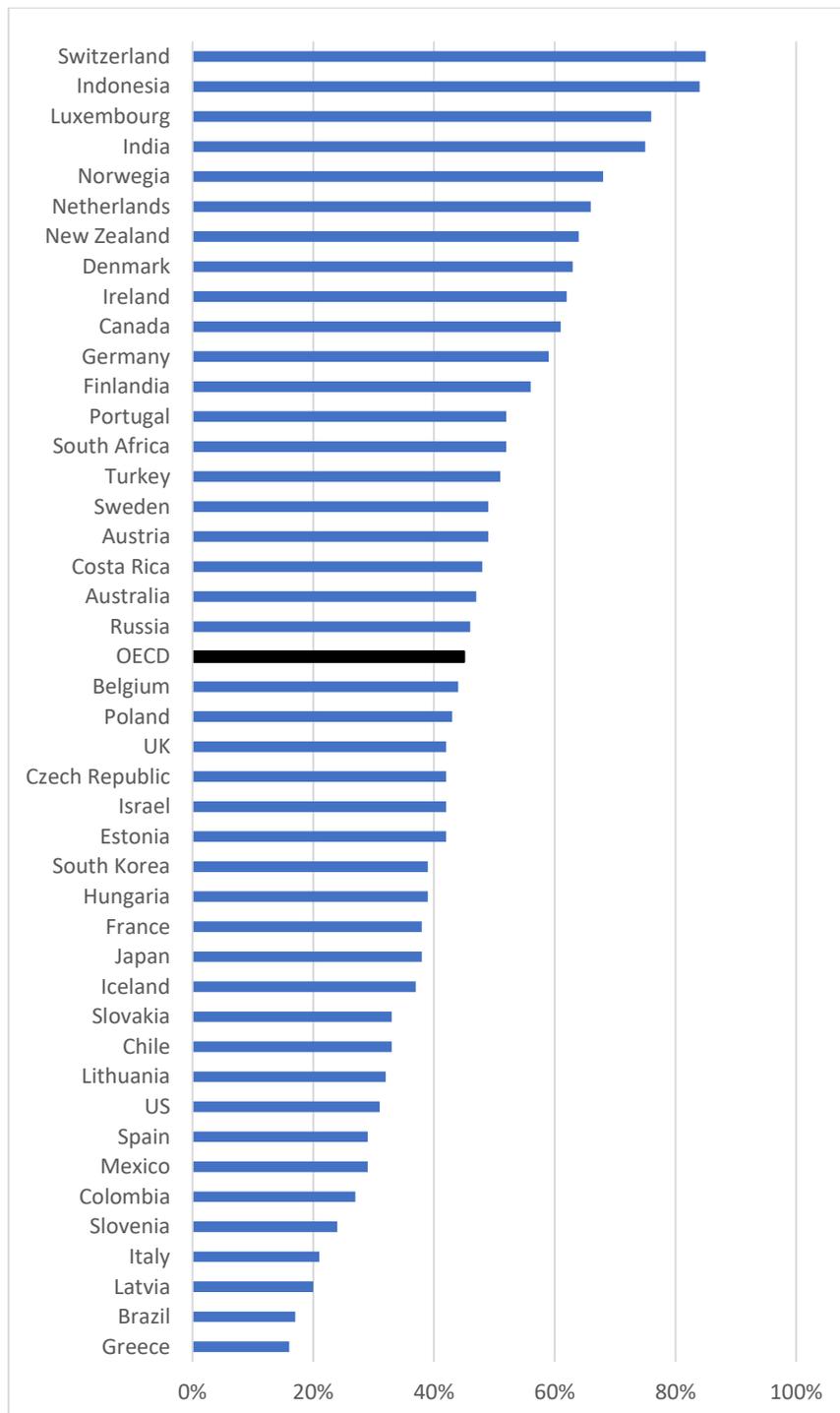
Terlihat pada grafik 1.1 bahwa total penerimaan asing di dunia selalu bergerak tidak menentu, banyak faktor yang memengaruhi penerimaan investasi asing negara tuan rumah. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan investasi asing yaitu dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan negara melalui fungsi pengawasan, dalam hal ini dilakukan oleh auditor eksternal. Audit eksternal sendiri bertujuan untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan cara yang benar, yang akan menilai keandalan dari laporan keuangan suatu entitas sesuai dengan prinsip yang berlaku (Satka, 2017).

Lembaga audit tertinggi di suatu negara dikenal sebagai *Supreme Audit Institution* (SAI) termasuk auditor umum, pengadilan auditor dan pemerintah, atau audit sektor publik tentunya memainkan peran utama dalam peningkatan akuntabilitas pemerintah dan sektor publik (Clark et al., 2007). Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan dan pelaporan keuangan pemerintah, termasuk lembaga

pemerintah, otoritas, perusahaan, dan entitas yang dikendalikan. Sehingga segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dapat di monitoring dan di evaluasi oleh pihak – pihak yang berkepentingan. SAI sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada rantai akuntabilitas yang terputus antara parlemen dan pemerintah, termasuk lembaga pemerintah, perusahaan, serta entitas yang dikendalikan (Salih & Hla, 2015), selain itu juga SAI memegang posisi kunci dalam proses akuntabilitas demokratis, di mana SAI dapat memberikan informasi yang objektif dan independen kepada warga negara serta perwakilan tentang bagaimana eksekutif pemerintah menggunakan dana publik (Bringselius, 2014). SAI juga dapat berkontribusi terhadap perkembangan berkelanjutan melalui fungsi auditnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan efek jangka pendek dan jangka panjang mengenai hasil auditnya. SAI harus mampu beradaptasi dengan tantangan, tren, dan ekspektasi yang timbul dari komitmen pembangunan berkelanjutan (Nagy et al., 2012). Salah satu caranya adalah dengan menciptakan pengetahuan audit baik di tingkat negara bagian ataupun di tingkat global.

SAI melaksanakan audit kepatuhan, keuangan, dan kinerja untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kinerja (Yamamoto & Kim, 2019). Audit kinerja merupakan proses peninjauan pemerintah yang mencakup berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dengan banyak cara. SAI dan audit kinerjanya dianggap penting bagi kualitas pemerintahan (Reichborn-Kjennerud & Johnsen, 2018). Audit kinerja berbeda dari jenis audit tradisional lainnya, seperti audit keuangan yang dimaksudkan untuk menilai keakuratan akun keuangan, atau audit kepatuhan yang dilakukan untuk memeriksa kesesuaian pengendalian dan aktivitas keuangan dan operasional perusahaan dengan hukum yang berlaku (Vasiliauskienė & Daujotaitė, 2019). Namun, tidak ada persyaratan atau standar wajib dalam setiap pelaksanaan audit kinerja, oleh karena itu setiap SAI harus mengambil keputusan sendiri. Batasan dalam audit kinerja adalah untuk menetapkan apakah kebijakan, program, proyek, atau organisasi publik telah beroperasi dengan memperhatikan ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan praktik manajemen yang baik (Johnsen et al., 2019)

**Gambar 1. 2**  
*Trust and Confidence in National Government*



Sumber: OECD

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa hasil survey OECD pada tahun 2018, Swiss memiliki tingkat kepercayaan pemerintah paling tinggi dengan tingkat kepercayaan 85%, sedangkan Indonesia sendiri berada di posisi ke dua dengan tingkat kepercayaan 84%. Kepercayaan sosial sendiri diyakini mampu memengaruhi pola investasi (Klein & Shtudiner, 2016). Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat meningkat sejalan dengan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Maka dari itu dibutuhkan lembaga pengawas untuk memonitoring kinerja pemerintah.

Dilansir dari laman INTOSAI.org diketahui terdapat beberapa kelompok kerja dari *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI). Seperti *African Organisation of Supreme Audit Institutions* (AFROSAI), *Arab Organization of Supreme Audit Institutions* (ARABOSAI), *Asian Organization of Supreme Audit Institutions* (ASOSAI), *Caribbean Organisation of Supreme Audit Institutions* (CAROSAI), *European Organization of Supreme Audit Institutions* (EUROSAI), *Organization of Latin American and Caribbean Supreme Audit Institutions* (OLACEFS), dan *Pacific Association of Supreme Audit Institutions* (PASAI). Selain itu juga, setiap negara memiliki lembaga audit tertingginya masing-masing. Australia memiliki SAI yang dikenal dengan nama *Australian National Audit Office*, China dengan *National Audit Office of the People's Republic of China*, Korea Selatan dengan *The Board of Audit and Inspection of Korea*, Polandia dengan *Najwyższa Izba Kontroli* dan masih banyak lainnya (BPK RI). Indonesia sendiri tergabung dalam ASOSAI dan memiliki lembaga pengawasan tertinggi yang dikenal dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semakin baik kinerja fungsi pengawasan dari lembaga tersebut maka akan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, sehingga para investor beranggapan kondisi tersebut merupakan kondisi yang menguntungkan. Oleh karena itu, semakin berkualitas pengawasan yang dilakukan oleh SAI dalam suatu negara akan menyebabkan semakin kondusifnya iklim investasi.

Selain dari sisi risiko (*risk*), investor juga akan memperhatikan dari sisi keuntungan (*benefit*) yang akan diterima. Keuntungan yang akan didapatkan oleh investor dapat diperoleh dengan berbagai bentuk, salah satu bentuk benefit yang dapat diperoleh yaitu keringanan dari sisi perpajakan. Melalui survey ATKearney (2019) dalam *Foreign Direct Investment Confidence Index* bertajuk “*Facing a Growing Paradox*” aspek pajak menempati peringkat pertama sebagai faktor yang memengaruhi seseorang atau instansi untuk melakukan investasi. Faktor lain yang menempati urutan teratas yaitu tata kelola dan regulasi, keduanya secara konsisten berada di antara lima faktor teratas untuk keputusan investasi sejak 2015.

Investor-investor asing sering kali secara substansial mendapatkan keuntungan dari insentif yang ditawarkan oleh negara tuan rumah (Ślusarczyk, 2018). Kebijakan perpajakan suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor untuk melakukan investasi pada negara tersebut. Semakin besar *benefit* dari sisi pajak yang ditawarkan oleh negara, maka akan meningkatkan nilai investasi asing bagi negara tuan rumah.

Penelitian mengenai investasi asing ini memang sudah banyak dilakukan, seperti penelitian Van Cauwenberge et al. (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “*International trade, foreign direct investments, and firms’ systemic risk Evidence from the Netherlands*” Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa risiko sistemik akan meningkat ketika perusahaan terlibat dalam aktivitas investasi langsung. Penelitian ini hanya melihat dari sisi risiko saja yaitu risiko sistematis dan hanya dilakukan dalam level perusahaan saja.

Sedangkan penelitian lainnya mengenai penerimaan investasi asing juga dilakukan oleh Rafat & Farahani (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “*The Country Risks and Foreign Direct Investment (FDI)*” Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa ada hubungan antara FDI dan risiko politik dan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik eksternal, ketegangan etnis, kondisi sosial ekonomi, profil investasi, militer, dan ketegangan agama merupakan penentu yang sangat signifikan atas masuknya investasi asing. Penelitian ini melihat risiko politik sebagai faktor yang memengaruhi arus masuk investasi asing.

Penelitian yang membahas aspek benefit juga sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti penelitian (Inglesi-lotz & Ajmi, 2021) dalam jurnalnya “*The impact of electricity prices and supply on attracting FDI to South Africa*”. Penelitian ini menyatakan bahwa penarikan FDI bergantung pada kondisi negara tuan rumah dan hasil empiris penelitian menyatakan bahwa pasokan listrik merupakan kontributor positif dari FDI di Afrika Selatan. Penelitian ini melihat pasokan listrik sebagai benefit yang didapat dari adanya peningkatan FDI.

Akan tetapi penelitian-penelitian tersebut belum melihat pada aspek perpajakan. Hingga saat ini belum banyak peneliti yang meneliti investasi melalui aspek *risk & benefitnya* terlebih lagi yang meneliti dalam level negara Sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penting dilakukan penelitian secara komprehensif yang mengkaitkan risiko (*risk*) dan keuntungan (*benefit*). Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh Kualitas Supreme Audit Institution terhadap Penerimaan Investasi Asing dengan Fiscal Freedom sebagai Variabel Moderasi**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah SAI Berpengaruh terhadap Penerimaan Investasi Asing suatu Negara?
2. Apakah *Fiscal Freedom* memoderasi pengaruh SAI terhadap penerimaan Investasi Asing suatu Negara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah SAI berpengaruh terhadap penerimaan investasi asing.
2. Untuk mengetahui Apakah *Fiscal Freedom* mampu memoderasi pengaruh SAI terhadap penerimaan investasi asing.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi ketidakterediaan literatur sebelumnya yang menguji aspek *risk* dan *benefit* dikaitkan dengan investasi asing yang dilakukan dalam level negara yang belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dapat memberikan pengetahuan baru untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas *Supreme Audit Institution* terhadap investasi yang dimoderasi oleh *Fiscal Freedom*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Fiskus

Penelitian ini dapat memberikan bukti empiris, bahwa adanya relaksasi dalam perpajakan dapat mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tuan rumah.

#### b. Bagi Pengawas Negara

Penelitian ini dapat memberikan bukti kepada investor dengan pengelolaan negara yang kondusif dapat menjelaskan bahwa peran SAI menjadi dominan dalam mengurangi ketidakpercayaan investor terhadap iklim investasi negara tuan rumah